

**RISALAH SIDANG PEMERIKSAAN
NOMOR: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/04.03/V/2024**

Agenda Sidang Pemeriksaan : Pemeriksaan Para Saksi
Waktu : Rabu, 15 Mei 2024

A. Majelis Pemeriksa

- | | |
|-------------------------|---------------|
| 1. Usman | Ketua Majelis |
| 2. Budi Kurnialis | Anggota |
| 3. Andi Setiawan | Anggota |
| 4. Ardi Suprianto | Anggota |
| 5. Mendra | Anggota |
| Dibantu oleh: | Anggota |
| 1. Sekretaris Pemeriksa | : M. Sarbini |
| 2. Asisten Pemeriksa | : Rozali |
| 3. Perisalah | : Marzuli |

B. Para Pihak

- | | |
|--------------------|---|
| 1. Pelapor | : 1. Iskandar, SH (Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Bengkulu. |
| 2. Terlapor | : 1. Agung Kurniawan
2. Zulkifli
3. Suhardi
4. Mukhlisin
5. Sri Jumarni
(KPU Kabupaten Bengkulu) |
| 3. Saksi Pelapor | : 1. Rezeki Hari Santoso
2. Safroni (Anggota KPU Bengkulu periode 2019-2024) |
| 4. Saksi Terlapor | : 1. Irwan Arif Saputra
2. Mia Regina (KAP) |
| 5. Ahli | : Firdaus (Pegiat Pemilu) |
| 6. Lembaga Terkait | : - |
| 7. Pihak terkait | : - |
| 8. Investigator | : - |

**SIDANG PEMERIKSAAN
Pukul: 14.00 Wib s.d 23.15 Wib**

No	Pihak Yang Disertai Nama	Keterangan/Dialog Yang Disampaikan Dalam Sidang Pemeriksaan
1	Sekretaris Pemeriksa (M. Sarbini)	- (Pembacaan tata tertib sidang). - Majelis Pemeriksa memasuki Ruang sidang. - Sekretaris Pemeriksa meminta hadirin untuk berdiri. - Sekretaris Pemeriksa mempersilahkan hadirin duduk kembali.
2	Ketua Majelis Pemeriksa (Usman)	Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wr wb.

		<p>Baik, skor saya cabut.</p> <p>Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, hari ini Rabu tanggal 15 Mei 2024 sidang pemeriksaan terhadap Laporan Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/04.03/V/2024 dengan agenda pemeriksaan para Saksi dibuka dan dibuka untuk umum. Tuk... Tuk... Tuk (Palu sidang).</p> <p>Selanjutnya saya ingatkan kembali apakah semua saksi sudah hadir? (dijawab hadir dan ada yang via zoom)</p> <p>Selanjutnya silahkan masing-masing pihak memperkenalkan diri dalam sidang ini.</p>
3	Pelapor (Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Bengkalis, Iskandar)	<p>Kami dari Pelapor akan menghadirkan sebanyak tiga (3) orang saksi, yakni :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sdr Rezeki Hari Santoso 2. Firdaus 3. Safroni
4	Ketua Majelis Pemeriksa (Usman)	Baik. Silahkan ketiganya maju ke depan untuk diambil sumpah dan sebelumnya menunjukkan identitas saksi.
5	Ketua Majelis Pemeriksa (Usman)	Silahkan Sdr saksi perkenalkan diri saudara terlebih dahulu
6	Saksi Pelapor (Rezeki Hari Santoso)	Nama saya Rezeki Hari Santoso, bahwa saya adalah Lo Partai Gerindra Kabupaten Bengkalis.
7	Ketua Majelis Pemeriksa (Usman)	Silahkan Saudara pelapor menanyakan kepada Saudara saksi
8	Pelapor (Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Bengkalis, Iskandar)	Baik. Terima kasih Ketua Majelis.
9	Pelapor (Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Bengkalis, Iskandar)	Tolong jelaskan kepada kami terkait pelaporan dana kampanye dalam Pemilu 2024, karena Saudara pernah mengikuti pelatihan pelaporan dana kampanye, sumbangan dana kampanye dan penggunaan dana kampanye. Karena hal ini sangat penting sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 18 Tahun 2023, Keputusan KPU 1677 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye dan regulasi lainnya.
10	Saksi Pelapor (Rezeki Hari Santoso)	Menjelaskan panjang lebar terkait proses penyampaian dana kampanye melalui Sikadeka sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
11	Ketua Majelis Pemeriksa (Usman)	<p>Silahkan nanti apa yang dibaca tersebut dapat disampaikan kepada Majelis.</p> <p>Baik. Silahkan kepada Pelapor dan Terlapor untuk selanjutnya mengajukan pertanyaan kepada saksi</p>
12	Pelapor (Sekretaris DPC Partai Gerindra)	Bahwa sejak saudara menjadi Lo Partai Gerindra, berapa kali saudara ikut pelatihan?

	Kabupaten Bengkulu, Iskandar)	
13	Saksi Pelapor (Rezeki Hari Santoso)	Selain dilakukan KPU Bengkulu, kita di provinsi juga mengikuti pelatihan yang dilaksanakan partai di tingkat provinsi. Di KPU Bengkulu kita juga seringkali ikut. Saya sempat memberikan masukan (sebagai pemateri) terkait bagaimana memasukkan anggaran
14	Pelapor (Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Bengkulu, Iskandar)	Apakah partai mengikuti?
15	Saksi Pelapor (Rezeki Hari Santoso)	Mengikuti, termasuk Partai PPP.
16	Pelapor (Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Bengkulu, Iskandar)	Apakah ada kewajiban parpol untuk membuat akun SIKADEKA? Dan apakah ada kewajiban calon anggota DPRD wajib menyampaikan akun SIKADEKA di parpol?
17	Saksi Pelapor (Rezeki Hari Santoso)	Untuk akun SIKADEKA sangat penting sebagaimana PKPU Nomo 18. Karena pelaporan parpol dan caleg untuk pelaporan melalui sistem tersebut.
18	Pelapor (Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Bengkulu, Iskandar)	Jika parpol maupun calon tidak membuat akun apakah nama calon tersebut dapat dimasukkan dalam sistem SIKADEKA?
19	Saksi Pelapor (Rezeki Hari Santoso)	Menurut komisioner yang lama mengingatkan kepada kami bahwa pentingnya melaporkan dana kampanye melalui akun SIKADEKA, seperti disampaikan bu Elsa (mantan komisioner). Jika tidak dilaporkan maka akan berpotensi tidak dilantiknya calon terpilih. Studi kasus partai Garuda yang tidak menyampaikan dana kampanye di SIKADEKA, maka parpol tersebut batal menjadi peserta Pemilu.
20	Pelapor (Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Bengkulu, Iskandar)	Untuk setiap penyelenggara pemilu untuk dapat membuktikan parpol tersebut memiliki akun berdasarkan apa?
21	Saksi Pelapor (Rezeki Hari Santoso)	Dari pelatihan, bahwa seluruh pelaporan dana kampanye melalui SIKADEKA.
22	Pelapor (Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Bengkulu, Iskandar)	Baik, terima kasih Saudara saksi.
23	Ketua Majelis Pemeriksa (Usman)	Saudara Pelapor apakah masih ada pertanyaan tambahan
24	Pelapor (Sekretaris DPC Partai Gerindra)	Cukup ketua Majelis. Terima kasih.

	Kabupaten Bengkulu, Iskandar)	
25	Ketua Majelis Pemeriksa (Usman)	Sebelum ke Majelis Pemeriksa, silahkan apakah ada pertanyaan dari Saudara Terlapor?
26	Terlapor (KPU Kabupaten Bengkulu) Suhardi.	Terima kasih Ketua Majelis Apa peran dan tugas Saudara?
27	Saksi Pelapor (Rezeki Hari Santoso)	Tugas dan peran saya menghimpun seluruh caleg di Gerindra dan memasukkan transaksi kegiatan dana kampanye melalui sistem SIKADEKA.
28	Terlapor (KPU Kabupaten Bengkulu) Suhardi.	Artinya tugas saudara menghimpun pelaporan dana kampanye dari Caleg melalui SIKADEKA
29	Saksi Pelapor (Rezeki Hari Santoso)	Iya. Yang wajib menyampaikan pelaporan dana kampanye (rekening dana kampanye) ditunjuk kepada saya. Dalam pelaporan dana kampanye, sebenarnya calon dapat melaporkan sendiri di sistem SIKADEKA, namun banyak yang dilakukan oleh LO.
30	Terlapor (KPU Kabupaten Bengkulu) Suhardi.	Terkait calon yang tidak memiliki akun di parpol, apakah Lo bisa submit?
31	Saksi Pelapor (Rezeki Hari Santoso)	Tetap bisa melakukan submit.
32	Majelis Pemeriksa (Budi Kurnialis)	Apakah saudara kenal Lo Partai PPP?
33	Saksi Pelapor (Rezeki Hari Santoso)	Kenal.
34	Majelis Pemeriksa (Budi Kurnialis)	Apakah secara fakta Saudara mengetahui jika PPP tidak melaporkan LPPDK
35	Saksi Pelapor (Rezeki Hari Santoso)	Saya mengetahui.
36	Majelis Pemeriksa (Budi Kurnialis)	Apakah saudara bisa melihat atau mengakses akun sikadeka PPP?
37	Saksi Pelapor (Rezeki Hari Santoso)	Tidak.
38	Majelis Pemeriksa (Budi Kurnialis)	Siapa yang menyampaikan laporan
39	Saksi Pelapor (Rezeki Hari Santoso)	Kami melaporkan melaporkan LADK melalui aplikasi dan meminta KPU untuk melihat kembali apakah ada perbaikan. Ini merupakan inisiatif kami.
40	Majelis Pemeriksa (Budi Kurnialis)	Tanggal berapa terakhir penyampaian terakhir LPPDK (submit)
41	Saksi Pelapor (Rezeki Hari Santoso)	Tanggal 23 Februari 2024 batas akhir. Lalu masuklah informasi jika 25 s.d 29 Februari 2024 adalah masa perbaikan LPPDK.
42	Majelis Pemeriksa (Ardi Suprianto)	Dari pelaporan, apa output atau produk hukum yang dibuat KPU terkait hasil audit LPPDK?
43	Saksi Pelapor (Rezeki Hari Santoso)	Kami terima tanda terima dari KAP lebih kurang satu jam melalui SIKADEKA.
44	Majelis Pemeriksa (Ardi Suprianto)	Jadi setelah parpol menyampaikan laporan (Submit), dia sudah menyampaikan.

45	Saksi Pelapor (Rezeki Hari Santoso)	Iya. Bahwa ketika sudah keluar hasil audit KAP, di bagian kesimpulan dinyatakan bahwa patuh atau tidak patuhnya sebuah parpol dalam pelaporan LPPDK.
46	Majelis Pemeriksa (Ardi Suprianto)	Kan ada balasan dari KAP, jika ada parpol yang submit namun tidak ada pelaporan dana kampanye apakah ada balasan dari KAP?
47	Saksi Pelapor (Rezeki Hari Santoso)	Tetap ada dan diterima. Dan itu kita peroleh dari keterangan dari pihak partai di provinsi.
48	Majelis Pemeriksa (Andi Setiawan)	Berapa penting pelaporan dana kampanye saat pelatihan yang diberikan KPU Bengkalis.
49	Saksi Pelapor (Rezeki Hari Santoso)	Sangat penting, bahkan ada sanksi pidana yang disampaikan jika ada parpol yang tidak melaporkannya. Salah satunya terkait tidak ditetapkan calon terpilih karena tidak melaporkan dana kampanye.
50	Majelis Pemeriksa (Mendra)	Saudara tahu jika PPP belum melaporkan dana kampanye (LPPDK) dari KPU Bengkalis. Tanggal berapa saudara ketahui itu?
51	Saksi Pelapor (Rezeki Hari Santoso)	Ya, sesuai pengumuman KPU, sekitar tanggal 5 April 2024.
52	Majelis Pemeriksa (Mendra)	Kapan fakta sebenarnya pelaporan atau penyampaian LPPDK ke KAP?
53	Saksi Pelapor (Rezeki Hari Santoso)	Sesuai pengumuman KPU Bengkalis, batas akhirnya adalah 20 Maret 2024.
54	Majelis Pemeriksa (Mendra)	Saudara tahu bagaimana teknis pelaporan dana kampanye?
55	Saksi Pelapor (Rezeki Hari Santoso)	Pertama ada terdata di SIKADEKA parpol dan calon melalui rekening khusus dana kampanye. Contoh ada calon A yang ingin membuat alat peraga kampanye, maka parpol membuat rincian anggaran biaya dan parpol menerima sumbangan dana dari calon dan selanjutnya dikembalikan ke calon. Calon mengeluarkan rincian anggaran pengeluaran penggunaan dana kampanye, termasuk menambah item pengeluaran yang tidak ada dalam sistem SIKADEKA.
56	Majelis Pemeriksa (Mendra)	Siapa yang membuat akun SIKADEKA di Parpol?
57	Saksi Pelapor (Rezeki Hari Santoso)	Yang membuat akun SIKADEKA adalah parpol, sementara calon dapat membuat akun sendiri dan hanya memantau.
58	Majelis Pemeriksa (Mendra)	Jadi terkait dengan partai PPP atas nama Sdr Firman, dari mana Saudara tahu jika beliau tidak menyampaikan LPPDK.
59	Saksi Pelapor (Rezeki Hari Santoso)	Saya tidak tahu dan tidak menyebutnya secara khusus, namun yang diketahui terdapat 15 calon dari PPP Bengkalis tidak menyerahkan LPPDK ke KAP melalui akun SIKADEKA.
60	Majelis Pemeriksa (Mendra)	Saudara kenal dengan Saudara Firman? Dan apa posisinya?
61	Saksi Pelapor (Rezeki Hari Santoso)	Saya kenal, tapi saya tidak tahu apakah beliau pengurus PPP. Setahu saya beliau adalah anggota DPRD Bengkalis sebelum ini.
62	Majelis Pemeriksa (Budi Kurnialis)	Jadwal yang tertera di laman KPU (SIKADEKA), tanggal 23 s.d 29 Februari 2024 penyampaian LPPDK. Kemudian tanggal 25 keluar menu baru, yaitu perbaikan LPPDK di SIKADEKA. Tanggal 23 Februari 2024 submit atas parpol

		Tanggal 24 Februari 2024 submit atas calon.
63	Ketua Majelis Pemeriksa (Usman)	Apakah Saudara tahun jika tanggal 23 dan 24 PPP tidak melaporkan LPPDK?
64	Saksi Pelapor (Rezeki Hari Santoso)	Tidak tahu..
65	Ketua Majelis Pemeriksa (Usman)	Sejak kapan Saudara menjadi Lo Partai Gerindra?
66	Saksi Pelapor (Rezeki Hari Santoso)	Saya menjadi Lo 26 September 2023
67	Ketua Majelis Pemeriksa (Usman)	Apa saja tugas LO?
68	Saksi Pelapor (Rezeki Hari Santoso)	Narahubung antara parpol ke KPU dan Bawaslu yang menghimpun seluruh jalannya administratif partai yang berlaku mulai dari SILON sampai ke pelaporan dana kampanye.
69	Ketua Majelis Pemeriksa (Usman)	Sebagai Lo sering berhubungan dengan KPU. Sepanjang mengurus partai, apakah Saudara ada mengingatkan Lo PPP terkait dana kampanye?
70	Saksi Pelapor (Rezeki Hari Santoso)	Tidak ada. Hanya saja berkomunikasi dengan partai Gelora terkait bagaimana pelaporan dana kampanye dan sifatnya diskusi biasa saja.
71	Ketua Majelis Pemeriksa (Usman)	Pelapor ada yang ingin ditambahkan?
72	Pelapor (sekretaris DPC partai Gerindra Kab. Bengkalis Iskandar)	Baik. Terima kasih. Jika seandainya ada calon yang tidak memiliki akun SIKADEKA, apakah namanya akan tertera di laman SIKADEKA.
73	Saksi Pelapor (Rezeki Hari Santoso)	Bagi calon yang tidak memiliki akun namanya tidak tertera di SIKADEKA.
74	Ketua Majelis Pemeriksa (Usman)	Terlapor ada tambahan pertanyaan?
75	Terlapor KPU Bengkalis (Anggota KPU Mukhlisin)	Terima kasih. Menurut pengetahuan Saudara saksi terkait hasil audit KAP mengenai patuh dan tidak patuh apakah calon tersebut dapat ditetapkan sebagai caleg.
76	Saksi Pelapor (Rezeki Hari Santoso)	Sejauh saya ketahui, tidak ada ketentuan jika hasil KAP itu jadi acuan bagi KPU dalam menetapkan atau tidak menetapkan yang bersangkutan sebagai calon terpilih. Namun secara spesifik hal itu diatur dalam pertauran KPU sendiri.
77	Terlapor KPU Bengkalis (Anggota KPU Mukhlisin)	Yang memiliki akun SIKADEKA siapa di aprpol?
78	Saksi Pelapor (Rezeki Hari Santoso)	Parpol dan calon.
79	Terlapor KPU Bengkalis (Anggota KPU Mukhlisin)	Ketika calon tidak memiliki akun dalam akun parpol, apakah parpol bisa submit pelaporan dana kampanye?
80	Saksi Pelapor	Parpol tetap dapat memsubmit. Namun calon dapat mensubmit

	(Rezeki Hari Santoso)		dalam akun miliknya sendiri di akun parpol.
81	Ketua Pemeriksa (Usman)	Majelis	Apakah ada pertanyaan tambahan dari Majelis, Pelapor? Baik. Silahkan saksi kembali ke tempat.
82	Ketua Pemeriksa (Usman)	Majelis	Baik, selanjutnya saksi kedua kami persilahkan. Baik Saudara saksi (Safroni), apakah saudara dalam keadaan sehat?
83	Saksi Pelapor (Saksi Fakta) (Safroni)		Sehat, alhamdulillah.
84	Ketua Pemeriksa (Usman)	Majelis	Silahkan Saudara jelaskan terkait fakta-fakta apa saja yang Saudara ketahui dalam permasalahan ini?
85	Saksi Pelapor (Saksi Fakta) (Safroni)		Langsung saja, yang jelas kami saaty itu adalah anggota KPU Bengkalis. Terkait LPPDK sebelum batas akhir yang tertera di PKPU 18 Tahun 2023, KPU Bengkalis telah menyurati parpol mengenai imbauan penting bahwasanya parpol harus menyamopaikan Laporan Penerimaan Penggunaan Dana Kampanye pada Februari 2024. Sebelum jatuh tempo kami sampikan. Bahwa di PKPU 18 Tahun 2023 terkait parpol yang tidak menyampaikan laporan ada sanksinya.
86	Ketua Pemeriksa (Usman)	Majelis	Terima kasih Saudara saksi. Selanjutnya Pelapor silahkan menggali keterangan saksi.
87	Pelapor (Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Bengkalis, Iskandar)		Baik. Kapan terakhir Saudara menjabat komisioner KPU Bengkalis.
88	Saksi Pelapor (Saksi Fakta) (Safroni)		Terakhir 4 Maret 2024 sesuai SK KPU RI.
89	Pelapor (Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Bengkalis, Iskandar)		Berarti sebelum berakhir menjabat, saudara pasti mengetahui proses dalam LPPDK. Baik. Sepengetahuan Saudara karena terakhir tanggal 29 Februari 2024 ketika itu saudara masih menjabat. Apakah dalam proses pencermatan pelaporan dana kampanye PPP pada saat itu diterima atau tidak?
90	Saksi Pelapor (Saksi Fakta) (Safroni)		Saya menandatangani BA pada tanggal 29 Februari 2024 ada salah satu partai tidak diterima pelaporan dana kampanye.
91	Terlapor Bengkalis (Anggota KPU Suhardi)	KPU	Sewaktu menjabat di KPU, apa divisi yang saudara bidang?
92	Saksi Pelapor (Saksi Fakta) (Safroni)		Saya membidangi divisi data dan informasi?
93	Terlapor Bengkalis (Anggota KPU	KPU	Divisi apa yang membidangi dana kampanye?

	Suhardi)	
94	Saksi Pelapor (Saksi Fakta) (Safroni)	Secara teknis di divisi teknis, namun BA pleno diketahui semua divisi.
95	Terlapor KPU Bengkalis (Anggota KPU Suhardi)	Apakah saudara melihat lampiran di BA
96	Saksi Pelapor (Saksi Fakta) (Safroni)	Tidak, saya tidak melihat lampiran BA yang ditandatangani itu.
97	Anggota Majelis Pemeriksa (Budi Kurnialis)	Pada tanggal 29 fgebruari, saudara mengatakan bahwa saudara menandatangani BA Pleno itu, apakah ada bukti yang dapat diperlihatkan?
98	Saksi Pelapor (Saksi Fakta) (Safroni)	Saya menandatangani, namun segala bukti ada di sekretariat KPU Bengkalis.
99	Anggota Majelis Pemeriksa (Budi Kurnialis)	Berapa orang komisioner yang tandatangan BA itu?
100	Saksi Pelapor (Saksi Fakta) (Safroni)	4 orang
101	Anggota Majelis Pemeriksa (Budi Kurnialis)	Pada tanggal 29 Februari, jam berapa saudara tandatangan?
102	Saksi Pelapor (Saksi Fakta) (Safroni)	Saya lupa. Saya menandatangani BA yang menyatakan jika partai tidak diterima. Sementara nama partainya ada di lampiran. Saya mengetahui dan tidak melihat lampiran BA pleno, namun saya diberitahu jika itu terkait partai PPP.
103	Anggota Majelis Pemeriksa (Ardi Suprianto)	Seinbat saudara berapa kali imbauan kepada parpol terkait pelaporan dana kampanye?
104	Saksi Pelapor (Saksi Fakta) (Safroni)	Seingat saya tanggal 26 Februari 2024.
105	Anggota Majelis Pemeriksa (Ardi Suprianto)	Apakah ada sosialisasi pelaporan dana kampanye kepada p[arpol?
106	Saksi Pelapor (Saksi Fakta) (Safroni)	Seingat saya hal itu ada dan dilakukan Divisi Teknis. Dapat saya sampaikan bahwa semua komisioner seharusnya bisa melihat perkembangan parpol dalam pelaporan dana kampanye (sebagai viewer). Dan saya sendiri tidak memiliki akun viewer.
107	Anggota Majelis Pemeriksa (Mendra)	Parpol yang tidak melaporkan dana kampanye, apa ada sanksinya. Sebagaimana diketahui tanggal tertanggal 29 Februari 2024 saudara menandatangani BA terkait tidak diterimanya PPP dalam laporan dana kampanye. Benar begitu?
108	Saksi Pelapor (Saksi Fakta) (Safroni)	Iya, saya hanya menandatangani saja. Sementara pembahasan mengenai hal itu sudah dilakukan oleh tiga komisioner KPU sebelumnya. Waktu itu saya baru pulang dari Mandau.
109	Anggota Majelis Pemeriksa	Terkait SIKADEKA, yakni admin atau operatornya siapa di KPU?

	(Mendra)	
110	Saksi Pelapor (Saksi Fakta) (Safroni)	Setahu saya Saudara Irwan Arif selaku Kasubag Teknis di KPU Bengkalis.
111	Ketua Majelis Pemeriksa (Usman)	Sejauh pengetahuan anda, pada saat menandatangani BA pada tanggal 29 Februari 2024, siapa saja yang tahu mengenai PPP tidak diterima, dan apakah sekretariat KPU juga tahu?
112	Saksi Pelapor (Saksi Fakta) (Safroni)	Yang jelas Kasubag Teknis tahu hal itu.
113	Ketua Majelis Pemeriksa (Usman)	Menurut Saudara, pada tanggal 23 dan 24 Februari 2024 merupakan penyampaian terkahir LPPDK parpol dan calon, apakah PPP menyampaikan?
114	Saksi Pelapor (Saksi Fakta) (Safroni)	Menurut BA PPP tidak diterima, berarti partai tersebut tidak menyampaikan LPPDK.
115	Ketua Majelis Pemeriksa (Usman)	Baik, mengingat waktu Asar, Sidang kita skor karena azan Ashar. ----- Baik, skor dicabut. Selanjutnya Saudara saksi, waktu di KPU anda menjabat sebagai divisi apa?
116	Saksi Pelapor (Saksi Fakta) (Safroni)	Saya menjabat di Divisi Perdatin (Perencanaan, Data dan Informasi).
117	Ketua Majelis Pemeriksa (Usman)	Untuk urusan LPPDK dibawah divisi apa?
118	Saksi Pelapor (Saksi Fakta) (Safroni)	Divisi Teknis.
119	Ketua Majelis Pemeriksa (Usman)	PPP dari awal LADK, kemudian LPSDK dan selanjutnya apakah PPP pernah menyampaikan?
120	Saksi Pelapor (Saksi Fakta) (Safroni)	Menyampaikan, tapi saya lupa apakah diterima atau tidak diterima.
121	Ketua Majelis Pemeriksa (Usman)	Apakah saudara menyimpan salinan BA tanggal 29 Februari 2024 yang saudara ikut tandatangani itu?
122	Saksi Pelapor (Saksi Fakta) (Safroni)	Tidak, namun BA itu juga ditembuskan ke Bawaslu.
123	Pelapor (Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Bengkalis, Iskandar)	Siapa yang berhak membuka akun SIKADEKA?
124	Saksi Pelapor (Saksi Fakta) (Safroni)	Sepengetahuan saya adalah KPU, peserta pemilu dan Bawaslu sebagai viewer.
125	Pelapor (Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Bengkalis, Iskandar)	Apakah parpol bisa membuka akun itu melalui KPU.

126	Saksi Pelapor (Saksi Fakta) (Safroni)	Secara teknis saya tidak tahu.
127	Pelapor (Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Bengkalis, Iskandar)	Apakah keputusan penandatanganan itu melalui divisi teknis saja, dan apakah saudara tahu hal-hal terkait dengan BA
128	Saksi Pelapor (Saksi Fakta) (Safroni)	Tahu.
129	Terlapor KPU Bengkalis (Anggota KPU Suhardi)	Apakah saudara saksi tahu bagaimana Parpol menyampaikan LPPDK
130	Saksi Pelapor (Saksi Fakta) (Safroni)	Secara teknis saya tidak tahu, namun Divisi Teknis lebih tahu.
131	Ketua Majelis Pemeriksa (Usman)	Sebagai viewer apakah saudara pernah mengecek parpol yang menyampaikan LPPDK?
132	Saksi Pelapor (Saksi Fakta) (Safroni)	Kalau di aplikasi lain, bagi komisioner yang menjadi viewer maka ia dapat melihat proses perkembangan data. Saya lupa terkait dana kampanye apakah saya dibuat akun viewer untuk itu, karena saya tidak pernah melihatnya. Sepengetahuan saya hanya PPP yang tidak diterima laporan LPPDK-nya, parpol yang lain saya tidak tahu.
133	Ketua Majelis Pemeriksa (Usman)	Pengetahuan saudara LPPDK ini penting apa tidak?
134	Saksi Pelapor (Saksi Fakta) (Safroni)	Menurut PKPU 18 Tahun 2023, hal yang penting, karena bisa berakibat tidak dilantiknya calon terpilih yang tidak melaporkan LPPDK
135	Anggota Manjelis Pemeriksa (Ardi Suprianto)	Apakah di setiap tahapan pelaporan ada disampaikan kepada Saudara terkait pelaporan dana kampanye?
136	Saksi Pelapor (Saksi Fakta) (Safroni)	Biasanya di akhir tahapan pelaporan baru disampaikan kepada saya terkait tahapan yang dilalui.
137	Anggota Manjelis Pemeriksa (Ardi Suprianto)	Siapa yang menyampaikan kepada Saudara terkait adanya partai PPP yang tidak melaporkan LPPDK?
138	Saksi Pelapor (Saksi Fakta) (Safroni)	Saudara Kasubag Teknis Irwan Arif.
139	Terlapor KPU Bengkalis (Anggota KPU Suhardi)	Sepengetahuan Saudara apakah permasalahan yang terjadi itu?
140	Saksi Pelapor (Saksi Fakta) (Safroni)	Berkaitan tidak diterimanya laporan LPPDK.
141	Ketua Majelis Pemeriksa (Usman)	Baik. Apakah Pelapor ada pertanyaan?
142	Pelapor	Bagaimana penyampaian LPPDK maupun hal lainnya dapat

	(Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Bengkalis, Iskandar)	dikatakan tidak diterima oleh KPU?
143	Saksi Pelapor (Saksi Fakta) (Safroni)	Tidak diterimanya laporan sesuatu itu karena tidak disubmit.
144	Pelapor (Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Bengkalis, Iskandar)	Seingat saudara saksi ketika menandatangani BA yang isinya ada salah satu parpol di Bengkalis tanggal 29 Februari 2024 tidak melaporkan LPPDK, bahwa saudara tidak berada di Bengkalis (Mandau), dimana saudara tandatangani BA tersebut?.
145	Saksi Pelapor (Saksi Fakta) (Safroni)	BA itu diantar staf ke rumah saya dan saya tandatangani di rumah.
146	Terlapor KPU Bengkalis (Anggota KPU Suhardi)	Menjelaskan terkait sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 118 PKPU 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye.
147	Anggota Majelis Pemeriksa (Mendra)	Siapa yang mengeluarkan BA tersebut?
148	Saksi Pelapor (Saksi Fakta) (Safroni)	Yang jelas saya menerima BA dari Kasubag Teknis dan setelah dilakukan pleno oleh komisioner.
149	Anggota Majelis Pemeriksa (Mendra)	Apakah ada batas waktu komisioner KPU Bengkalis dalam menetapkannya?
150	Saksi Pelapor (Saksi Fakta) (Safroni)	Bunyi di BA tetap tanggal 29 Februari 2024 karena merupakan deadline.
151	Anggota Majelis Pemeriksa (Andi Setiawan)	Terkait rapat pleno 29 Februari 2024, bahwasanya PPP tidak menyampaikan LPPDK atau laporan?
152	Saksi Pelapor (Saksi Fakta) (Safroni)	Menurut pengetahuan saya tidak menyampaikan laporan LPPDK.
153	Ketua Majelis Pemeriksa (Usman)	Baik, kami kira cukup. Silahkan Saudara saksi kembali ke tempat. Baik, sidang kita skor dulu dan dilanjutkan pukul 16.30 WIB. Ketuk palu (tuk... tuk...)
154	Sekretaris Pemeriksa (M. Sarbini)	Hadirin dimohon berdiri... Majelis meninggalkan ruangan. Hadirin dipersilahkan duduk kembali... Dan diingatkan kembali sidang pemeriksaan ini akan dilanjutkan kembali nanti pukul 16.30 WIB. Terima kasih.
155	Ketua Majelis Pemeriksa (Usman)	Baik, dengan ini skor saya cabut kembali. Baik, sesuai agenda sidang selanjutnya dengan agenda pemeriksaan keterangan saksi ahli. Saya ingatkan kembali untuk menjaga ketertiban dalam sidang pemeriksaan ini.

		Sidang pemeriksaan selanjutnya yakni mendengarkan keterangan saksi ahli.
156	Ketua Majelis Pemeriksa (Usman)	Saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat?
157	Saksi Ahli Pelapor (Firdaus, SH)	Iya, saya dalam kondisi sehat ketua majelis
158	Ketua Majelis Pemeriksa (Usman)	Baik, Bisa saudara jelaskan keterangan saudara sesuai dengan keahlian saudara? Kami persilahkan saudara saksi ahli untuk menjelaskan.
159	Saksi ahli (Firdaus, SH)	Pertama, ijin saya memperkenalkan diri, sebelumnya nama saya firdaus, SH, Pekerjaan saya sekarang ialah penggiat pemilu, riwayat saya dalam penyelenggaraan pemilu pernah menjadi penyelenggara pemilu yakni Komisioner KPU Provinsi Riau tahun 2019 sampai dengan 2024. Mohon ijin majelis, sebelumnya saya sudah membuat keterangan tertulis, untuk menghemat waktu mohon ijin untuk membacakan keterangan secara tertulis. (dibacakan) Dapat kami sampaikan pada saat penyampaian laporan dana kampanye di Provinsi Riau, Partai Garuda telah kami berikan sanksi.
160	Ketua Majelis Pemeriksa (Usman)	Terima kasih kepada saksi ahli, selanjutnya pihak pelapor dan terlapor apakah ada yang ingin ditanyakan? Kami persilahkan kepada pelapor untuk mendalami keterangan dari saudara saksi ahli.
161	Pelapor (Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Bengkalis Iskandar)	Dilihat dari riwayat saksi ahli, kami yakin kepada saksi ahli untuk dapat memberikan pencerahan, dalam proses tahapan penetapan calon terpilih dan perolehan kursi, ada berapa banyak undang-undang atau peraturan dalam menentukan penetapan calon terpilih?
162	Saksi ahli (Firdaus, SH)	Baik, kalau terkait regulasi Undang-Undang tentang penyelenggaraan Pemilu hanya satu yaitu UU Nomor 7 Tahun 2017. Namun KPU diminta untuk membuat pedoman teknis, agar tahapan penyelenggaraan pemilu bisa berjalan. Karena di dalam UU itu tidak disebutkan secara teknis. Terkait tahapan penetapan calon terpilih ada PKPU 6 tahun 2024 dan PKPU 18 tahun 2023 tentang dana kampanye. Jika bicara hirarki peraturan perundangan, PKPU sebetulnya setara dengan peraturan pemerintah. KPU dalam melaksanakan tahapan pemilu dengan menerbitkan Peraturan KPU, seiring itu Bawaslu juga mengeluarkan Perbawaslu. Karena KPU dalam melaksanakan prakteknya sudah menyebutkan soal mekanisme pelaporan dana kampanye, dalam pasal 105 tadi menyebut untuk pelaporan, penyusunan, audit, format dan tanda terima yaitu melalui aplikasi yang namanya

		<p>SIKADEKA.</p> <p>Secara teknis sudah diatur bagaimana bentuk format bagaimana bentuk laporan, apa yang harus dicermati dalam peraturan KPU. Makanya KPU mengeluarkan bukan dalam bentuk peraturan, tetapi dalam bentuk keputusan.</p> <p>Itulah aturan detailnya terkait peraturan tahapan pelaporan dana kampanye dalam proses penetapan calon terpilih.</p>
163	Pelapor (Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Bengkalis Iskandar)	<p>Terima kasih saudara saksi ahli, kami merinding mendengar terkait peraturan perundangan yang saudara sampaikan.</p> <p>Selanjutnya kami ingin menanyakan apakah KPU Kabupaten Bengkalis dalam menetapkan calon terpilih ini sesuai dengan mekanisme dan tata cara prosedur sesuai perundang-undangan?</p>
164	Saksi ahli (Firdaus, SH)	<p>Menurut saya, KPU bengkalis dalam menetapkan keputusan penetapan calon terpilih tidak sesuai dengan mekanisme dan tata cara dalam peraturan perundang-undangan.</p> <p>Kenapa dana kampanye dimasukkan kedalam ketentuan penetapan calon terpilih, karena hal itu dapat mengakibatkan adanya sanksi pembatalan, yakni tidak diikutsertakan dalam penentuan perolehan kursi dan tidak ditetapkan sebagai calon terpilih.</p>
165	Pelapor (Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Bengkalis Iskandar)	<p>KAP ditunjuk oleh KPU Bengkalis, intinya apakah dalam mencari KAP Negara mengeluarkan biaya untuk melaksanakan audit LPPDK ini?</p>
166	Saksi Ahli (Firdaus, SH)	<p>Iya tentunya Negara mengeluarkan biaya, saya mengikuti proses penunjukan KAP. Dalam pengadaan KAP itu ada Sekretariat dengan menunjukan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen).</p> <p>Dalam penunjukan KAP, ada standar syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi KAP. Di Provinsi Riau saja, ada lebih dari 17 KAP baik dari dalam provinsi maupun dari luar provinsi.</p>
167	Pelapor (Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Bengkalis Iskandar)	<p>Dalam hal terkait LPPDK, ada prinsip "<i>yang penting menyampaikan tetapi isi tak penting, atau kata lain laporan kosong</i>". Apakah isi dalam laporan itu penting atau tidak?</p>
168	Saksi Ahli (Firdaus, SH)	<p>Iya, setahu saya jika sudah menyampaikan berarti itu sudah dikatakan melaporkan, setelah itu baru dilakukan pencermatan.</p> <p>Kenapa penting LPPDK oleh peserta pemilu, tadi saya mendengar ada beberapa pertanyaan mengenai hal apabila memberikan keterangan tidak benar dapat di pidana.</p> <p>Dalam PKPU 18 tahun 2023, dalam point menimbang ketika dalam kampanye pemilu didanai dan menjadi tanggung jawab peserta pemilu, apakah itu partai politik, apakah itu calon anggota DPRd, serta untuk mewujudkan prinsip kepastian hukum, tepat waktu, akuntabel dan transparan.</p> <p>Jika kita melihat hal tersebut, tentunya dalam melakukan</p>

		kampanye harus dicatat dan melaporkan sesuai dengan kegiatan kampanye.
169	Pelapor (Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Bengkalis Iskandar)	Terima kasih, selanjutnya system aplikasi SIKADEKA, Seandainya laporan itu berupa kertas kosong, apakah dalam sistim aplikasi itu dapat diterima?
170	Saksi (Firdaus, SH)	Kalau kita flashback, yakni pada pencalonan anggota DPRD, ada aplikasi yang namanya SILON. Hal itu dapat diterima. Begitu juga aplikasi SIKADEKA tetap dilakukan penerimaan, selanjutnya baru dilakukan pencermatan oleh KPU, apakah sesuai atau tidak.
171	Pelapor (Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Bengkalis Iskandar)	Selanjutnya saudara ahli, Dari uraian produk-produk hukum yang saudara disampaikan, saya ingin bertanya apakah parpol itu wajib menyampaikan laporan LPPDK atau caleg tidak penting?
172	Saksi ahli (Firdaus, SH)	Laporan LPPDK oleh Parpol menjadi satu kesatuan dengan laporan calon anggota DPRD, terlepas dia melaporkan atau tidak. Tadi saya mendengar ada caleg potensial saja yang wajib melaporkan. Parpol dan calon sebetulnya menjadi hal yang tidak terpisahkan. Kalau kita lihat yang melaksanakan kampanye, apakah parpol atau calon melakukan kampanye? Hal ini tentu caleg bersangkutan yang tahu, karena dia yang langsung melakukan kampanye.
173	Pelapor (Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Bengkalis Iskandar)	Berkaitan dengan kasus ini, berdasarkan hasil pengumuman KPU Bengkalis tanggal 5 April 2024 nomor 133 dan pengumuman 202, serta dengan hasil audit dana kampanye dari KAP yang diumumkan KPU Kabupaten Bengkalis kepada publik, tertera disitu bahwa berdasarkan audit dari KAP tidak satu orang pun caleg DPRD menyampaikan laporan dana kampanye, apakah hal itu melanggar UU nomor 7 tahun 2017, Peraturan KPU nomor 18 tahun 2023 pasal 118, PKPU nomor 06 tahun 2024?
174	Saksi ahli (Firdaus, SH)	Parpol melaporkan LPPDK kepada KAP yang tunjuk, KAP mengeluarkan atau menerbitkan tanda terima setelah di submit. KAP menerima LPPDK dari parpol peserta pemilu menggunakan Form yang ada di lampiran 5. Mungkin Partai Gerindra punya tanda terimanya bahwa mereka sudah mengajukan laporan dana kampanye, pengisian form lampiran 5, dan tanda terima dari KAP. Disitu dicantumkan ada kop suratnya, tanda terima laporan pada hari, tanggal, dan tahun sekian, serta submitenya jam berapa, hari apa, tahun berapa. Karena ini merupakan aplikasi makanya tidak bisa di ubah-ubah. Tetap dia akan sama antara tanda terima yang diterbitkan oleh KAP dengan lampiran BA Rekapitulasi. Sehingga nanti bisa dilakukan pembuktian oleh majelis. Seandainya Partai PPP tadi, tanda terimanya itu diterbitkan sesuai dengan waktu tanggal 20 Maret 2024, maka berlakulah pasal ketentuan soal penetapan calon terpilih di PKPU 6 tahun 2024. Bahwa partai yang bersangkutan tidak menyampaikan

		<p>laporan sesuai jadwal. Lalu bagaimana dengan calegnya, parpol tidak melaporkan. Tentunya kalau parpol tidak melaporkan, begitu juga dengan calegnya. Apalagi tidak ada laporan sama sekali, sehingga nanti bisa dinilai dari hasil audit oleh KAP apakah patuh atau tidak patuh, kemudian apakah sesuai dengan materil hukumnya.</p> <p>Apabila tidak sesuai dengan ketentuan tersebut, maka berlakulah aturan pelanggaran tersebut. Untuk selanjutnya Saya serahkan kepada majelis untuk menilai.</p>
175	Pelapor (Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Bengkalis Iskandar)	Parpol wajib melaporkan LPPDK secara detail terkait batas waktu, apakah jika seandainya parpol melewati batas waktu itu apakah ada sanksi?
176	Saksi Ahli (Firdaus, SH)	Soal batas waktu itu terkait kepastian hukum. Dalam kontek pemilu, hal ini menjadi kepastian hukum. Jika melewati itu maka tidak dapat diterima.
177	Pelapor (Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Bengkalis Iskandar)	kami mengajukan permohonan laporan ini berdasarkan data-data, sesuai keputusan KAP terkait LPPDK ada yang tidak patuh secara materil. Seandainya, dalam hal ini dikabulkanlah permohonan laporan ini, terkait penetapan perolehan kursi serta penetapan calon terpilih sesuai dengan PKPU 6 itu seperti apa?
178	Saksi Ahli (Firdaus)	<p>Didalam PKPU Nomor 6 tahun 2024 tentang penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih, lalu bagaimana kalau nanti majelis memutuskan terpalor melanggar prosedur, tata cara dan mekanisme soal penetapan perolehan kursi dan calon terpilih, sehingga dalam hal ini PPP tidak dihitung</p> <p>Sampai sejauh ini, belum ada aturan terkait bagaimana mekanisme. Tetapi kalau kita lihat dari norma-norma yang ada pada PKPU 6, kalaulah tidak diikutkan dalam penetapan perolehan kursi dan calon terpilih apa yang mau diputus? Berarti suaranya tidak lagi dihitung. Sehingga majelis memerintahkan kepada KPU untuk melakukan perbaikan atas tata cara dan prosedur nya sesuai pkpu 6 dan pkpu 18. Tidak dihitung dia, suara GERINDRA tidak dihitung.</p>
179	Pelapor (Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Bengkalis Iskandar)	Kami meminta kepada majelis untuk membuka aplikasi SIKADEKA.
180	Ketua Majelis Pemeriksa (Usman)	<p>Baik, nanti diakhir persidangan akan kita minta admin SIKADEKA untuk membuka.</p> <p>Selanjutnya, kepada Terlapor apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saudara saksi ahli (Firdaus, SH)?</p> <p>Kami, persilahkan kepada saudara terlapor untuk mendalami.</p>
181	Terlapor KPU Bengkalis (Anggota KPU)	<p>Baik, terima kasih majelis.</p> <p>Saudara saksi, kami ingin menanyakan. Kalau parpol</p>

	Mukhlisin)	menyampaikan LPPDK di aplikasi SIKADEKA, itu dibuktikan dengan dokumen apa?
182	Saksi ahli (Firdaus, SH)	Adanya tanda terima yang dikeluarkan oleh KAP.
183	Terlapor KPU Bengkulu (Anggota KPU Mukhlisin)	Jadi, apabila parpol telah submit artinya tanda terima menjadi bukti parpol telah menyampaikan LPPDK?
184	Saksi ahli (Firdaus, SH)	Iya
185	Terlapor KPU Bengkulu (Anggota KPU Mukhlisin)	Selanjutnya, apabila tanda terima itu telah diterima oleh parpol yang bersangkutan, apakah itu menjadi rujukan untuk menetapkan atau tidak menetapkan parpol dalam perolehan kursi dan calon terpilih?
186	Saksi ahli (Firdaus, SH)	Sebetulnya simple saja, parpol melakukan submit dan begitu di submit akan mengeluarkan tanda terima, yang perlu dibuktikan apakah tanda terima itu sesuai dengan lampiran 5 atau tidak. Dalam prosesnya parpol juga dapat melihat apakah tanda terima yang dikeluarkan oleh KAP itu bersesuaian atau tidak dengan lampiran Berita Acara KPU. Jadi memang simple, tinggal membuktikan. Sehingga pihak terlapor menyatakan ini sebagai tanda terima yang sah yang dikeluarkan oleh KAP. Sehingga KPU dalam hal ini terlapor diperintahkan untuk membuat rekapitulasi pencermatan berdasarkan tanda terima yang dikeluarkan oleh KAP.
187	Terlapor KPU Bengkulu (Anggota KPU Mukhlisin)	Kalau tanda terima itu sudah sesuai dengan legalitas dari KAP, apakah bisa dijadikan dokumen yang menyatakan bahwa parpol itu sudah sesuai menyampaikan laporan sesuai jadwal?
188	Saksi ahli (Firdaus, SH)	Maka tadi saya sampaikan, nanti bisa dilihat tanda terimanya tanggal berapa, apakah sesuai jadwal atau tidak? Kita bisa melihat dari situ. Sesuai tidak dengan format laporan lampiran 5 tadi.
189	Terlapor KPU Bengkulu (Anggota KPU Mukhlisin)	Kalau tanda terima sesuai dengan format yang dilampirkan, serta isinya juga sesuai dengan batas waktu yang disampaikan oleh parpol, apakah menjadi rujukan menetapkan calon terpilih?
190	Saksi ahli (Firdaus, SH)	Iya, pasti. Dokumen itu sebagai batas waktu yang menentukan, apakah parpol ini diikutkan sebagai penetapan calon terpilih atau tidak. Dokumen itu yang membuktikan.
191	Ketua Majelis Pemeriksa (Usman)	Baik, Mengingat waktu sudah menunjukan pada pukul 17.55 Wib, sebentar lagi akan masuk waktu sholat magrib. Sidang pemeriksaan selanjutnya akan dilanjutkan kembali pada pukul 20.00 wib.
192	Ketua Majelis Pemeriksa (Usman)	Skors disidang dicabut. Baik, kita lanjutkan sidang pemeriksaan saksi ahli sesuai kesepakatan kita pukul 20.00 wib. Selanjutnya kepada terlapor, apakah masih ada pertanyaan

		yang ingin disampaikan atau apakah sudah cukup?
193	Terlapor KPU Bengkalis (Anggota KPU Suhardi)	Sudah cukup majelis.
194	Ketua Majelis Pemeriksa (Usman)	Baik, selanjutnya kami serahkan majelis untuk mendalami atau menggali keterangan dari saudara saksi ahli.
195	Anggota Majelis Pemeriksa (Budi Kurnialis)	Baik, terima kasih ketua majelis. Tadi saudara saksi ahli menyampaikan pernah menjabat komisioner KPU Provinsi Riau. Kapan masa berakhir masa jabatan saksi ahli di KPU Provinsi Riau?
196	Saksi Ahli (Firdaus, SH)	2 februari 2024
197	Anggota Majelis Pemeriksa (Budi Kurnialis)	Terkait patuh dan tidak patuh, ada pedoman penunjukan KAP
198	Saksi Ahli (Firdaus, SH)	Penunjukan KAP Kabupaten dilakukan oleh KPU Provinsi. Penunjukan KAP ada syarat-syarat yang ditetapkan untuk menunjukkan KAP. Hanya mendapat sertifikat dari AI. Kami berembuk dengan KPU RI.
199	Anggota Manjelis Pemeriksa (Andi Setiawan)	Aplikasi sikadeka dirubah?
200	Saksi Ahli (Firdaus, SH)	Submite dilakukan sepanjang masa pelaporan. Tidak bisa dirubah status submite. Data yang lengkap (laporan) baru bisa di submite.
201	Anggota Majelis Pemeriksa (Budi Kurnialis)	Terkait dengan tidak sesuai mekanisme, presdour dan tata cara, KPU Kabupaten Bengkalis itu tidak sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme sesuai dengan UU 7 tahun 2017? Tidak sesuai di poin apa?
202	Saksi Ahli (Firdaus, SH)	Terkait prosedur ada dasar yaitu pkpu 6 dalam penetapan calon terpilih. Didalam bab 4 atau 6 ada tersendiri tentang Dana Kampanye, itulah menjadi acuan rekan KPU untuk melihat penerimaan dana kampanye. Seharusnya KPU mencermati dahulu apakah kita menetapkan calon terpilih dengan menyertakan parpol yang menyerahkan laporan dana kampanye yang lengkap. Mekanisme itu yang tidak dilakukan. Ada mekanisme yang tidak sesuai yang dijalankan terlapor. Disitu sudah jelas melewati batas waktu.
203	Anggota Majelis Pemeriksa (Mendra)	Menurut yang saudara ketahui, dengan tidak ditetapkannya calon terpilih, apakah kursi di dapil tersebut menjadi berkurang atau bagaimana regulasinya?
204	Saksi Ahli (Firdaus, SH)	Pertama, kita kan menetapkan perolehan kursi melalui perolehan suara. Berapa suara yang didapat barulah diakumulasikan berapa kursi yang diperoleh. Kursi didapatkan melalui suara, kalau tidak ada suara berarti tidak ada kursi. Nah, bagaimana kalau PPP tidak diikuti dalam perolehan kursi dan calon terpilih. Dalam PKPU 6 tidak diatur

		<p>secara spesifik, kalau dibatalkan ini bagaimana. Aturan khususnya sampai sekarang belum ada.</p> <p>Tetapi berdasarkan asbabul nuzulnya, kenapa tidak disebutkan secara spesifik soal partai mana nanti dan mekanisme penyusunannya. Saya berpandangan jika sudah tidak diikuti, otomatis suara PPP tidak dihitung kembali. Jadi mohon maaf, saya sampai sekarang belum menemukan dasar hukumnya, aturannya bagaimana untuk pengganti PPP.</p>
205	Anggota Majelis Pemeriksa (Mendra)	Terkait LPPDK, apakah di UU Pemilu sebelumnya LPPDK sama dengan ketentuan perundangan yang saat ini?
206	Saksi Ahli (Firdaus, SH)	Sampai saat ini untuk pemilu tahun 2019 dan pemilu 2024 masih memakai dasar hukumnya masih sama, hanya PKPU nya saja yang berubah. Prosesnya tetap sama, Cuma aplikasinya berbeda. Dulu di 2019 aplikasinya tidak digabungkan antara kampanye dan dana kampanye. Sekarang mungkin menjadi SIKADEKA.
207	Ketua Majelis Pemeriksa (Usman)	SIKADEKA kan ada operatornya disetiap tingkatan, bawaslu hanya sebagai viewer/melihat, sepengetahuan saksi apakah operator kabupaten bisa melihat histori, kapan dia log out, kapan dia submit?
208	Saksi Ahli (Firdaus, SH)	Saya tidak memahami betul, tetapi berdasarkan pengalaman, berdasarkan aplikasi-aplikasi sebelumnya seperti SILON, SIPOL, dan lainnya, artinya hanya admin atau operator saja yang bisa melihat pergerakan data, laporan, tetapi tidak bisa merubah dia. Fungsi dari operator KPU kab/prov sebagai kantor surat aja, tidak bisa melakukan perubahan-perubahan. Yang bisa melakukan perubahan itu hanya admin dari parpol.
209	Ketua Majelis Pemeriksa (Usman)	Tadi saksi mengatakan bahwa ada mekanisme yang dilanggar oleh terlapor?
210	Saksi Ahli (Firdaus, SH)	<p>Di dalam PKPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum.</p> <p>Tapi ada satu bab, di bab 7 ada terkait dana kampanye. Jadi KPU itu harus melihat secara focus PKPU itu, jangan hanya melihat perolehan kursinya saja. Sementara ada satu bab lagi soal dana kampanye.</p> <p>Kenapa harus dimasukan dana kampanye dalam menetapkan calon terpilih, kalau tidak ada fungsinya. Berarti itu menjadi suatu fungsi. Harusnya rekapitulasi dulu hasil pencermatan dana kampanye. Status laporan KAP itu menjadi pedoman dan acuan dalam menetapkan calon terpilih.</p> <p>Nah, tata cara itu yang tidak dilakukan terlapor.</p>
211	Ketua Majelis Pemeriksa (Usman)	Terkait pemeriksaan KAP, kalau parpol melampirkan hanya nol saja apakah dikeluarkan tanda terima oleh KAP?
212	Saksi Ahli (Firdaus, SH)	<p>Saksi memperlihatkan dan menjelaskan format lampiran yang sesuai lampiran 5 kepada majelis pemeriksa.</p> <p>Hasil audit pasti keluar tidak patuh, yang penting jangan melewati</p>

		tanggal 29 februari 2024. Pasti diterima tetapi secara materi tidak bisa dinilai atau tidak patuh.
213	Pelapor (Sekretaris DPC partai Gerindra Kabupaten Bengkalis, Iskandar)	Terkait adanya tidak sesuai tata cara, siapakah yang memberikan sanksi dan kapan sanksi diberikan?
214	Saksi Ahli (Firdaus, SH)	Pemberian sanksi sesuai dengan tingkatan, kalau prosesnya di Kabupaten tentu yang memberikan sanksi yaitu tingkat kabupaten.
215	Ketua Majelis Pemeriksa (Usman)	Baik, selanjutnya apakah dari pihak pelapor dan terlapor masih ada yang ingin ditanyakan atautakah sudah cukup jelas?
216	Terlapor KPU Bengkalis (Anggota KPU Suhardi)	Sudah cukup jelas apa yang sudah dijelaskan oleh saudara saksi ahli, sehingga kami tidak bertanya lagi.
217	Ketua Majelis Pemeriksa (Usman)	Baik, apakah saudara saksi ingin menambakan keterangan tambahan?
218	Saksi Ahli (Firdaus, SH)	Terima kasih kepada majelis telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berdiskusi dalam sidang pemeriksaan ini, sesuai dengan pengalaman-pengalaman saya dapatkan. Saya berharap apa yang disampaikan ini, dapat menjadi bahan pertimbangan majelis dalam memutuskan perkara ini.
219	Ketua Majelis Pemeriksa (Usman)	Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan keterangan dari saksi fakta yang dihadirkan terlapor yakni dari auditor KAP via zoom. Selamat malam ibu MIA REGINA, apakah bisa dapat menunjukan kartu identitas saudara pada sidang pemeriksaan ini?
220	Saksi Fakta KAP (Mia Regina)	Iya, saya bersedia. Dengan menunjukan kartu identitas berupa kartu nama KAP.
221	Ketua Majelis Pemeriksa (Usman)	Sebelum saudara memberikan keterangan, saudara diwajibkan memberikan keterangan dibawah sumpah. Apakah saudara bersedia diambil sumpah sesuai agama yang dianut?
222	Saksi fakta KAP (Mia Regina)	Iya, saya bersedia diambil sumpah atas agama khatolik.
223	Ketua Majelis Pemeriksa (Usman)	Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan kepada terlapor untuk mendalami.
224	Terlapor KPU Bengkalis (Anggota KPU Suhardi)	Saudara saksi, kami dari terlapor yakni KPU Kabupaten Bengkalis, apakah ibu tau bahwa Partai PPP telah tersubmite pada tanggal 29 Februari 2024? Ada dua tanda terima yang diterima KPU Bengkalis yakni 29 februari dan 20 Maret 2024.
225	Saksi fakta KAP (Mia Regina)	Yang saya tahu dari system SIKADEKA itu, pada tanggal 20 maret itu saya membuka system Sikadeka saya melihat di bengkalis itu hasil dari laporannya itu belum di proses. Karena tiga hari sebelumnya, pada prosesnya dalam audit ini kita boleh

		meminta untuk mengunlock untuk mengecek semua proses data. Lalu sesudah audit cek semua, kami lempar lagi ke KPU apakah sudah ada yang sesuai boleh diunlock aja BA Pencermatannya. Tiga hari sebelum unlock itu, saya meminta kepada anggota saya untuk menghubungi KPU Bengkalis untuk di unlock BA Pencermatan. Karena KPU Bengkalis slow respon, dan saya di 20 maret membuka system juga kaget bahwa statusnya berubah. Lalu saya menghubungi ke KPU Provinsi lalu saya jelaskan kok statusnya berubah seperti ini. Dijelaskan tidak tersubmite ke LPPDK karena sebenarnya sudah submite. Itulah yang mengakibatkan kenapa ada tertimpa di 20 Maret.
226	Terlapor KPU Bengkalis (Anggota KPU Suhardi)	Sebelum tanggal 20 maret apakah sudah semua tersubmite?
227	Saksi fakta KAP (Mia Regina)	Iya benar, pada tanggal 29 februari itu sudah tersubmite semua.
228	Terlapor KPU Bengkalis (Anggota KPU Muklasin)	Pada tanggal 29 februari, apakah ada tanda terima yang dikeluarkan dari KAP hasil dari submite parpol?
229	Saksi fakta KAP (Mia Regina)	Iya, masih tersimpan. Otomatis dari system sudah keluar, tidak dikeluarkan dari KAP tetapi memang sudah kami isi dan kami cek dan otomatis keluar BA Pencermatan sudah tertera tanggal. Ada tanda terima by system bukan dari KAP yang mengeluarkan.
230	Terlapor KPU Bengkalis (Anggota KPU Muklasin)	Apakah bisa ditampilkan bukti/file atau dokumen tanda terima di sidang pemeriksaan ini?
231	Saksi fakta KAP (Mia Regina)	Iya bisa, dengan menampilkan tanda terima via zoom. Bukti tanggal 29 februari 2024.
232	Terlapor KPU Bengkalis (Anggota KPU Muklasin)	Yang ditampilkan itu, tanda terima pengisian LPPDK tanggal 29 februari 2024?
233	Saksi fakta KAP (Mia Regina)	Iya, betul bukti LPPDK dari Partai Persatuan Pembangunan.
234	Ketua Majelis Pemeriksa (Usman)	Baik, selanjutnya apakah dari Pelapor ada yang ingin ditanyakan?
235	Pelapor (Sekretaris DPC Partai Gerindra Kab. Bengkalis Iskandar)	Terima kasih kepada majelis, kami ingin bertanya bahwa paling lambat KAP Menerima LPPDK?
236	Saksi fakta KAP (Mia Regina)	29 Februari Pak.
237	Pelapor (Sekretaris DPC Partai Gerindra Kab. Bengkalis Iskandar)	Jika seandainya lewat dari 29 februari, apakah parpol bisa mengirimkan data lagi melalui akun sikadeka?
238	Saksi fakta KAP (Mia Regina)	Tidak bisa sih pak.
239	Pelapor (Sekretaris DPC	Seandainya ada parpol menyampaikan laporan itu lewat dari tanggal 29 februari apakah KAP tetap menerima atau menolak?

	Partai Gerindra Kab. Bengkalis Iskandar)	
240	Saksi Fakta KAP (Mia Regina)	Menolak, Karena ketentuannya di 29 februari.
241	Pelapor (Sekretaris DPC Partai Gerindra Kab. Bengkalis Iskandar)	Kami melihat dari pengumuman KPU Bengkalis, Kenapa bisa muncul LPPDK 20 Maret 2024?
242	Saksi fakta KAP (Mia Regina)	Kalau di KAP, kami tidak ada mengeluarkan Berita Acara. Yang saya submite kembali itu ditanggal 20 Maret itu yang saya tunjukan ke bapak sekalian. Jadi kalau ada Berita Acara 20 Maret dari kita tidak ada.
243	Pelapor (Sekretaris DPC Partai Gerindra Kab. Bengkalis Iskandar)	Berita acara yang dikeluarkan tanggal 29 februari apakah seperti ini? Dengan menunjukan ke zoom kepada saksi fakta.
244	Saksi fakta KAP (Mia Regina)	Formatnya yang seperti saya tunjukan tadi pak format. Tapi tidak ada nama KAP nya ya pak. Formatnya sudah dari system. Yaitu Berita acara pencermatan.
245	Pelapor (Sekretaris DPC Partai Gerindra Kab. Bengkalis Iskandar)	Menunjukan bukti tanda terima via zoom.
246	Saksi Fakta KAP (Mia Regina)	Iya tanda terima, kalau tanda terima itu otomatis ya pak, karena dia sudah submite lagi. Tanda terima di 29 februari otomatis akan tertimpa pada tanggal 20 maret. Yang tadi saya tunjukan di BA pencermatan itu yang pertama kali kami terima dan itu juga ada di sikadeka, dan bisa di download. BA pencermatan dan datanya tidak berubah.
247	Pelapor (Sekretaris DPC Partai Gerindra Kab. Bengkalis Iskandar)	Jadi yang berdasarkan pengumuman KPU Bengkalis, akibat munculnya submite tanggal 20 Maret yang lama hilang?
248	Saksi fakta KAP (Mia Regina)	Iya. Hilang tidak bisa muncul lagi.
249	Ketua Majelis Pemeriksa (Usman)	Baik, apakah ada lagi yang ingin disampaikan? Kami silakan anggota majelis untuk mendalami.
250	Anggota Majelis Pemeriksa (Budi Kurnialis)	Baik, tadi sudah ditunjukan tanda terima, apakah KAP juga punya tanda terima?
251	Saksi fakta KAP (Mia Regina)	Iya punya. Yang saya punya berita acara, namun tanda terima tidak bisa ditunjukin sekarang, karena berada di akuntan saksi.
252	Anggota Majelis Pemeriksa (Budi Kurnialis)	Saya akan menanyakan proses yang diawal ibu sampaikan tadi. Ada dua kali submite, yakni di tanggal 29 Februari dan di tanggal 20 Maret 2024, mohon dijelaskan?
253	Saksi fakta KAP (Mia Regina)	Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwasanya semua partai itu Batas waktu penyampainya terakhir tanggal 29 Februari 2024 melalui sikadeka ke KAP. Hanya dalam proses berjalannya audit kami ini, kami memeriksa perlengkapan-perengkapan proses yang dilakukan submite oleh partai. Kalau kita sudah

		memeriksa itu otomatis kita submit dan akan diperiksa kembali oleh KPU. Kalau ada yang kurang pas pemeriksaan kami dengan KPU, dan kemudian KAP merasa pemeriksaan KPU itu benar, kami boleh meminta di unlock yang namanya BA Pencermatan. Seingat saya itu di tanggal 16/17 maret itu saya meminta anggota saya untuk menghubungi KPU Bengkalis untuk di unlock BA Pencermatan khusus partai PPP Bengkalis. Jadi memang selama proses audit, KPU Bengkalis slow respon. Jadi di tanggal 16-17 maret itu tidak langsung di oke kabn untuk dibuka BA Pencermatannya. Setelah kami tunggu, tibalah ditanggal 20 Maret itu, saya sendiri yang buka sikadeka itu, saya lihat kenapa tiba-tiba proses itu berubah berbeda dari yang sebelumnya. Akhirnya saya hubungilah KPU Provinsi Riau dengan mbak uci, kok tampilan dari KPU Bengkalis ini seperti ini. Lalu beliau menyampaikan itu yang di unlock bukan BA Pencermatan tapi LPPDK nya yang di unlock. Kok berbeda seperti yang kami pinta. Sehingga di 20 Maret itu yang dianggap bukan BA Pencermatan tetapi LPPDK. Itu yang membuat tanda terimanya itu jadi berubah tanggal pak, begitu.
254	Anggota Majelis Pemeriksa (Ardi Suprianto)	Tadi ibu mia sampaikan bahwa tagl 29 Februari, telah tersubmite dari Partai PPP, terus di tanggal 20 Maret Juga ada, apakah ada perubahan isinya?
255	Saksi fakta KAP Pemeriksa (Mia Regina)	Tidak ada yang berubah
256	Anggota Majelis (Ardi Suprianto)	Apakah KAP menerima LPPDK yang lengkap dan telah ditandatangani oleh peserta pemilu tingkat Kabupaten atas nama Partai Persatuan Pembangunan?
257	Saksi fakta KAP (Mia Regina)	Kalau dibilang lengkap, mohon maaf juga pak. LPPDKnya di submit tapi saya lupa apakah ditandatangani atau tidak, karena itu ada di BA Pencermatan itu pak.
258	Anggota Majelis Pemeriksa (Mendra)	Apakah ada jejak digital atau bukti Partai PPP mensubmite bisa kita dapat?
259	Saksi fakta KAP (Mia Regina)	BA Pencermatan bisa ditunjukkan, isinya tidak ada perubahan. Cuma tanggalnya saja yang berubah.
260	Terlapor KPU Bengkalis (Anggota KPU Muklasin)	Apakah benar pada tanggal 29 Februari 2024, sudah ada submit yang dilakukan Partai PPP sehingga terbit tanda terima yang dikeluarkan oleh KAP?
261	Saksi fakta KAP (Mia Regina)	Kalau di tanggal 29 februari itu BA Pencermatan pak, kalau tanda terima itu biasanya di akhir-akhir baru diberikan, jadi tidak langsung BA Pencermatan keluar lalu tanda terima keluar.
262	Terlapor KPU Bengkalis (Anggota KPU Muklasin)	Jadi benar tanggal 29 februari telah tersubmite untuk partai PPP itu?
263	Saksi fakta KAP (Mia Regina)	Iya betul, di 29 Februari itu.
264	Pelapor (Sekretaris DPC Partai Gerinda Kab.	Bahwa dalam kentuan paling lambat tanggal 29 februari 2024 jam 23.59 wib penyampaian LPPDK. Apakah setelah itu ada masa perbaikan atau perubahan oleh setiap parpol?

	Bengkalis Iskandar)	
265	Saksi fakta KAP (Mia Regina)	Setelah tanggal 29 februari itu tidak boleh ada perubahan pak.
266	Pelapor (Sekretaris DPC Partai Gerinda Kab. Bengkalis Iskandar)	Apa alasan ibu untuk meminta Partai PPP untuk melakukan submite atau unlock?
267	Saksi fakta KAP (Mia Regina)	Jadi begini pak, saya tidak meminta untuk di submite disitu, saya hanya meminta untuk di unlock BA Pencermatan. Nah kalau ternyata itu di submite lagi, itu statusya sudah berubah kembali. Jadi saya tidak ada meminta untuk submite LPPDK, saya hanya meminta untuk diunlock BA Pencermatan.
268	Pelapor (Sekretaris DPC Partai Gerinda Kab. Bengkalis Iskandar)	Bagaimana BA Pencermatan dan tanda terima tanggal 20 Maret itu bisa ditampilkan?
269	Saksi fakta KAP (Mia Regina)	Bisa, dengan menunjukan Tanda Terima tanggal 20 Maret. 29 februari hanya BA Pencermatan pak, tanda terimanya sudah tertimpa di tanggal 20 Maret.
270	Pelapor (Sekretaris DPC Partai Gerinda Kab. Bengkalis Iskandar)	Dasar untuk diumumkan oleh KPU Bengkalis yang tanggal 29 februari atau 20 Maret?
271	Saksi fakta KAP (Mia Regina)	Kalau dari KPU sendiri kan tidak ada ngomong apa-apa kepada KAP. Justru, KAP yang menyampaikan ke KPU, dan KPU juga taunya semua parpol ini sudah submite di 29 Februari 2024.
272	Pelapor (Sekretaris DPC Partai Gerinda Kab. Bengkalis Iskandar)	Di dalam sidang ini bukti tanda terima ada dua, yang ibu bilang sebenarnya 20 maret 2024 tetapi yang kami lihat tadi, ada bukti tanda terima yang sama, kok bisa begitu?
273	Saksi fakta KAP (Mia Regina)	Jadi begini pak, kita kan system secara otomatis ya pak. Kami dari KAP sendiri tidak ada sama sekali mendownload untuk tanda terimanya. Setelah proses semua auditnya, baru kami download. Disitulah bisa terlihat tanda terimanya tanggal 20 Maret 2024.
274	Pelapor (Sekretaris DPC Partai Gerinda Kab. Bengkalis Iskandar)	Yang disampaikan KAP kepada KPU untuk diumumkan itu adalah hasil bukti tanda terima tadi?
275	Saksi fakta KAP (Mia Regina)	Ya, karena kalau diunlock LPPDK tanggal 20 maret, otomatis tanda terimanya tertera 20 maret.
276	Terlapor KPU Bengkalis (Anggota KPU Mukhlisin)	Pencermatan itu dilakukan pas kapan, pasca setelah submite dari partai atau kapan?
277	Saksi fakta KAP (Mia Regina)	Jadi setelah batas akhir tanggal 29 februari itu disitulah KAP mulal memeriksa semua dokumen dan mencermati.
278	Terlapor KPU Bengkalis (Anggota KPU Suhardi)	Terkait tanda terima ada dua, terkait tanggal 29 februari apakah KAP ada punya?

279	Saksi fakta KAP (Mia Regina)	Iya, Saya hanya mendownload di tanggal 20 maret.
280	Ketua Majelis Pemeriksa (Usman)	Tadikan ibu mia mengatakan bahwa pada tanggal 16-17 maret itu meminta KPU Bengkalis untuk membuka atau meng unlock kembali BA Pencermatan, nah boleh kami tahu apa kepentingan KAP atau auditor untuk mengunlock BA Pencermatan tersebut?
281	Saksi fakta KAP (Mia Regina)	Oke, jadi pada saat kami terima semua data di 29 februari itu, kan banyak dokumen pak, misalnya apakah LPPDK disitu sudah ditandatangani? Lalu Human error kami buat tidak ditandatangani ketua, sekretaris, bendahara, ada mungkin kesalahan sehingga kami hanya melihat satu tandatangan, lalu kami tulis di Ba Pencermatan itu tandatangan tidak sah, begitu. Setelah sudah diperiksa, itukan diperiksa kembali oleh pihak KPU, mereka kalau tidak sesuai langsung whatsapp ke kami, ini kenapa ibu tulis tanda tangannya hanya satu padahal sudah lengkap, begitu. Kalau sudah ada revisinya yang kami tunjuk, kami meminta untuk di unlock untuk kami perbaiki kalau itu kesalahan dari KAP.
282	Anggota Majelis Pemeriksa (Mendra)	Apakah ada bukti bahwa dari PPP tersubmite pada tgl 29 februari?
283	Saksi fakta KAP (Mia Regina)	BA Pencermatan tetap pada tanggal 29, namun tanda terima berubah di tanggal 20 maret.
284	Pelapor (Sekretaris DPC partai Gerindra Kab. Bengkalis Iskandar)	Apakah boleh KAP mengeluarkan 2 bukti tanda terima dalam satu partai?
285	Saksi fakta KAP (Mia Regina)	Sekali lagi saya tegaskan KAP tidak mengeluarkan tanda terima, tanda terima itu bisa langsung di download pada sistim SIKADEKA. Kenapa terlihat logo kami, yang seakan akan kami yang mengeluarkan, karena kami memang wajib mengunlock di SIKADEKA itu logo kami.
286	Pelapor (Sekretaris DPC partai Gerindra Kab. Bengkalis Iskandar)	Berarti di tanggal 29 februari, KAP tidak mengeluarkan bukti tanda terima ini?
287	Saksi fakta KAP (Mia Regina)	Yang di tanggal 29 februari itu, saya sama sekali melihat atau mengunlock semua tanda terima dari semua provinsi/ kabupaten untuk Partai Persatuan Pembangunan. Jadi pada saat selesai audit semuanya, baru disitulah saya mendownload tanda terima.
288	Pelapor (Sekretaris DPC partai Gerindra Kab. Bengkalis Iskandar)	Jadi di dalam sidang persingan ini ada dua bukti tanda terima, berate haqnya satu bukti tanda terima yang dapat di pertanggung jawabkan. Tapi biarlah majelis pemeriksa yang menilai itu. Terimakasih atas keterangan yang KAP berikan, apapun bentuknya kami mohon majelis untuk bagaimama tindaklanjutnya.
289	Ketua Majelis Pemeriksa (Usman)	Terimakasih ibu mia atas waktunya untuk hadir dalam memberikan keterangan terkait keterangan sebagai saksi fakta terkait laporan pelanggaran administrasi ini. Selanjutnya mendengarkan keterangan saksi terlapor untuk

		admin sikadeka.
290	Ketua Majelis Pemeriksa (Usman)	baik, sebelum saksi memberikan keterangan, apakah saudara bersedia diambil sumpah berdasarkan agama yang saudara anut?
291	Saksi terlapor (Irwan Arif Saputra)	Iya, saya bersedia majelis.
292	Ketua Majelis Pemeriksa (Usman)	Apakah saudara dalam keadaan sehat?
293	Saksi terlapor (Irwan Arif Saputra)	Sehat majelis
294	Ketua Majelis Pemeriksa (Usman)	Untuk mempersingkat waktu, bisa saudara jelaskan tugas-tugas apa saja yang saat ini yang saudara emban di KPU Kabupaten Bengkalis?
295	Saksi terlapor (Irwan Arif Saputra)	Izin majelis, untuk menyapaikan nama saya Irwan Arif Saputra, admin SIKADEKA, jabatan kassubag teknis di KPU Kabupaten bengkalis.
296	Ketua Majelis Pemeriksa (Usman)	Terkait dengan job desk, bisa saudara sampaikan? Apa saja yang pernah saudara kerjakan terkait SIKADEKA?
297	Saksi terlapor (Irwan Arif Saputra)	Terkait SIKADEKA, saya membuat viewer bagi komisioner KPU Kabupaten Bengkalis untuk melihat data keluar masuk dari system SIKADEKA.
298	Ketua Majelis Pemeriksa (Usman)	Baik, terima kasih Selanjunya kami minta kepada terlapor untuk mendalami keterangan saksi terlapor.
299	Terlapor KPU Bengkalis (Anggota KPU Suhardi)	Baik saudara irwan, Bisa saudara jelaskan terkait aplikasi sikadeka ini, apa peran saudara untuk LPPDK bagi peserta pemilu tahun 2024?
300	Saksi terlapor (Irwan Arif Saputra)	Aplikasi sikadeka itu ialah pencacatan aktivitas keluar masuk anggaran dari parpol dan caleg.
301	Terlapor KPU Bengkalis (Anggota KPU Suhardi)	Siapa yg mebuat akun untuk pelaporan dana kampanye?
302	Saksi terlapor (Irwan Arif Saputra)	Kalau untuk akun parpol, mereka sendiri yang mebuat.Kalau akun caleg yang membikin itu calegnya sendiri, tetapi kebanyakan dibantu oleh LO Partai.
303	Terlapor KPU Bengkalis (Anggota KPU Suhardi)	Terkait dengan pelaporan dana kampanye, kan saudara ini sebagai admin sikadeka, sebagai admin sikadeka apakah bisa melihat siapa-siapa saja yang sudah submite atau siapa-siapa saja yang belum submite?
304	Saksi terlapor	Bisa, yang sudah submite bisa kita lihat.

	(Irwan Arif Saputra)	
305	Terlapor KPU Bengkalis (Anggota KPU Suhardi)	Apakah tanggal 29 Februari 2024, PPP telah mensubmite LPPDK?
306	Saksi terlapor (Irwan Arif Saputra)	Sudah tersubmite.
307	Terlapor KPU Bengkalis (Anggota KPU Suhardi)	Terkait dengan submite tanggal 29 februari, untuk PPP apakah diberikan tanda terima oleh KAP?
308	Saksi terlapor (Irwan Arif Saputra)	Ada, sudah di download.
309	Terlapor KPU Bengkalis (Anggota KPU Suhardi)	Cukup majelis.
310	Ketua Majelis Pemeriksa (Usman)	Baik, selanjutnya silahkan kepada pelapor untuk mendalami keterangan saksi terlapor.
311	Pelapor (Sekretaris DPC Partai Gerindra Kab. Bengkalis Iskandar)	Terima kasih majelis, Saudara ditunjuk oleh KPU Bengkalis sebagai admin SIKADEKA terkait laporan dana kampanye, bagaimana perkembangan dan situasi dana kampanye. Selanjutnya sepengetahuan saudara, Akun parpol itu wajib atau tidak?
312	Saksi terlapor (Irwan Arif Saputra)	Izin menjawab, kalau untuk akun partai itu wajib.
313	Pelapor (Sekretaris DPC Partai Gerindra Kab. Bengkalis Iskandar)	Akun dari caleg anggota yang pontensial wajib atau tidak?
314	Saksi terlapor (Irwan Arif Saputra)	Wajib
315	Pelapor (Sekretaris DPC Partai Gerindra Kab. Bengkalis Iskandar)	Apakah saudara sering berhubungan dengan pengurus Partai Persatuan pembangunan?
316	Saksi terlapor (Irwan Arif Saputra)	Sering, kalau untuk berurusan dengan LO Partai, saya berhubungan dengan seluruh LO Partai pak.
317	Pelapor (Sekretaris DPC Partai Gerindra Kab. Bengkalis Iskandar)	Kenal dengan pengurusnya atau LO dari Partai Persatuan Pembangunan?
318	Saksi terlapor (Irwan Arif Saputra)	Kenal pak
	Pelapor (Sekretaris DPC Partai Gerindra Kab. Bengkalis	Tadi saudara saksi mengatakan akun partai peserta pemilu wajib, terkait dengan permohonan kami disini berdasarkan pengumuman KPU Bengkalis tanggal 5 april 2024, saudara tahu dalam satu partai dalam satu pengumuman itu lewat batas

	Iskandar)	waktu yang ditentukan undang-undang yaitu 20 Maret 2024?
319	Saksi terlapor (Irwan Arif Saputra)	Setelah terjadi submite itu baru tahu, karena pada awalnya permintaan KAP untuk membuka unlock itu yang saya lakukan malah ke unlock LPPDK nya. Sebenarnya dia ada dua, satu unlock BA Pencermatan dan unlock LPPDK. Pas KAP itu meminta unlock pada tanggal 17, 18, dan ternyata tanggal 20 maret karena KPU Bengkalis slow respon, itu terunlock di LPPDK nya. Seperti aplikasi yang sudah saya pernah pegang, baik itu sirekap maupun tungsuru dan sipol yang jelas sudah lewat tanggal, itu biasanya tidak bisa lagi dia tersubmite di dalam, dia sudah terkunci.
320	Pelapor (Sekretaris DPC Partai Gerindra Kab. Bengkalis Iskandar)	Didalam PKPU nomor 18 tahun 2024, ada batas waktu yang ditentukan 15 hari, boleh tidak setelah tanggal 29 februari itu melakukan perbaikan?
321	Saksi terlapor (Irwan Arif Saputra)	Bisa, Kalau KAP meminta dengan alasan BA Pencermatan di unlock serta melalui provinsi.
322	Pelapor (Sekretaris DPC Partai Gerindra Kab. Bengkalis Iskandar)	Kalau bisa apa dasar hukumnya?
324	Saksi terlapor (Irwan Arif Saputra)	Kalau dasarnya hanya berdasarkan permintaan provinsi saja. BA Pencermatan masih bisa dibuka, tapi tidak untuk LPPDK nya.
325	Pelapor (Sekretaris DPC Partai Gerindra Kab. Bengkalis Iskandar)	Tunjukkan dasar kepada kami, dasar saudara merubah itu?
326	Saksi terlapor (Irwan Arif Saputra)	Hanya berdasarkan permintaan KAP untuk mengunlock BA Pencermatan itu hanya PPP saja, tetapi jika partai lain juga bisa dibuka. Dia tidak merubah LPPDK, karena yang bisa masuk kesitu hanya KAP, untuk melakukan pencermatan. Tidak ada dasar surat, namun melalui koordinasi lewat admin sikadeka Provinsi. Tidak ada bersurat untuk pembukaan dalam BA Pencermatan dari KAP.
327	Pelapor (Sekretaris DPC Partai Gerindra Kab. Bengkalis Iskandar)	Apakah saudara tahu tentang sanksi bagi yang melewati batas waktu pelaporan dana kampanye?
328	Saksi terlapor (Irwan Arif Saputra)	Iya, saya tahu.
329	Pelapor (Sekretaris DPC Partai Gerindra Kab. Bengkalis Iskandar)	Didalam pengumuman KPU Bengkalis tertera tanggal 20 maret 2024, jika seandainya betul tanggal 29 februari 2024 Partai PPP melaporkan, kenapa tidak di umumkan di pengumuman tanggal 5 April 2024?

330	Saksi terlapor Irwan Arif Saputra)	Disistem SIKADEKA dokumen untuk tanggal 29 februari itu sudah tertimpa karena pada saat tanggal 20 maret telah tersubmite lagi.
331	Pelapor (Sekretaris DPC Partai Gerindra Kab. Bengkalis Iskandar)	Jadi dasar yang digunakan KPU Bengkalis untuk pengumuman itu melalui SIKADEKA atau BA Pencermatan?
332	Saksi terlapor Irwan Arif Saputra)	Iya itu berdasarkan Sikadeka, 20 maret yang terakhir.
333	Pelapor (Sekretaris DPC Partai Gerindra Kab. Bengkalis Iskandar)	Tentu ada bukti penerimaan, apakah sama bukti yang dikeluarkan ini dengan apa yang ada di sikadeka?
334	Saksi terlapor Irwan Arif Saputra)	Bukti tanda terima ada hanya di 20 Maret 2024.
335	Pelapor (Sekretaris DPC Partai Gerindra Kab. Bengkalis Iskandar)	Jadi ada bukti submite tanggal 29 Februari?
336	Saksi terlapor Irwan Arif Saputra)	Ada pak, saya sempat download pak waktu itu, karena setelah selesai semua partai melaporkan di tanggal 29 februari itu. Di jarak sampai pada tanggal 5 april kan masih panjang, jadi masih sempat untuk mendownload. Yang diumumkan itu berdasarkan unduhan dari aplikasi.
337	Pelapor (Sekretaris DPC Partai Gerindra Kab. Bengkalis Iskandar)	Kenapa ada dua bukti tanda terima?
338	Saksi terlapor Irwan Arif Saputra)	Kalau itu ketika saya membuka sikadeka, jadi memang saat itu memang saya download.
339	Pelapor (Sekretaris DPC Partai Gerindra Kab. Bengkalis Iskandar)	Baik, kami mohon kepada majelis untu membuka aplikasi sikadeka sebagai bahan pembuktian.
340	Ketua Majelis Pemeriksa (Usman)	Baik, pertanyaan sudah cukup? Selanjutnya, kami persilahkan kepada anggota majelis untuk mendalami keterangan saksi terlapor.
341	Anggota Majelis Pemeriksa (Ardi Suprianto)	Terkait admin sikadeka, apakah setiap history atau aktivitas sikadeka dapat saudara pantau?
342	Saksi terlapor Irwan Arif Saputra)	Penginputan dari parpol sudah masuk secara langsung, waktu parpol melakukan submite tidak bisa kita pantau.
343	Anggota Majelis Pemeriksa	Akun dari parpol dari partai apakah bisa saudara buka?

	(Ardi Suprianto)	
344	Saksi terlapor Irwan Arif Saputra)	Akun partai tidak bisa dibuka.
345	Anggota Majelis Pemeriksa (Ardi Suprianto)	Jadi bagaimana saudara mau melihat bahwa salah satu partai itu sudah mensubmite? Apakah ada laporan dan sebagainya?
346	Saksi terlapor Irwan Arif Saputra)	Submite parpol di sikadeka kan punya waktu, nanti akan timbul atau muncul bahwa partai A dan B ini sudah submite, serta muncul tanda mata. Berarti hal itu sudah tersubmite.
347	Anggota Majelis Pemeriksa (Ardi Suprianto)	Apakah pada tanggal 29 february itu, pasti saudara menunggu sampai pukul 23.59 wib, setahu saudara seluruh partai sudah tersubmite?
348	Saksi terlapor (Irwan Arif Saputra)	Semua parpol pada tanggal 29 feb telah tersubmite termasuk PPP. Kalau untuk history admin kabupaten tidak bisa membuka. Namun untuk hal ini kami membuktikan dengan bukti P-4
349	Ketua Majelis Pemeriksa (Usman)	Ada tambahan dari majelis lain, dipersilahkan.
350	Anggota Majelis Pemeriksa (Mendra)	Terkait dengan tanggal 29 Februari 2024, apakah saudara masih melihat perkembangan SIKADEKA?
351	Saksi terlapor Irwan Arif Saputra)	Tidak selalu standby, namun ada masanya bisa melihat submit jika ada arahan dari provinsi. Tapi saya melihat hanya sekali-kali. Pada tanggal 20 Maret 2024 saya ternyata membuka unlock untuk partai PPP untuk pencermatan, namun saya tidak sengaja membuka sampai ke LPPDK (terklik dua kali). Saya tidak sengaja mengunlock LPPDK, ternyata yang diminta KAP untuk unlock BA Pencermatan.
352	Anggota Majelis Pemeriksa (Mendra)	Adakah saudara diberi pelatihan terkait Sikadeka?
353	Saksi terlapor Irwan Arif Saputra)	Ada. Namun dalam prakteknya kita terkadang lupa.
354	Anggota Majelis Pemeriksa (Mendra)	Ada tak warning setelah tanggal 29 Februari 2024 jangan ada lagi membuka LPPDK, atau melakukan tindakan diluar kewenangan?
355	Saksi terlapor Irwan Arif Saputra)	Ada. Sebatas arahan agar jangan dibuka LPPDK.
356	Anggota Majelis Pemeriksa (Andi Setiawan)	Pada tanggal 29 Februari 2024 komisioner KPU melakukan rapat pleno terkait pelaporan LPPDK atau dana kampanye. Maksudnya bahwa ada satu partai yang tidak melaporkan mensubmit LPPDK di tanggal 29 Februari 2024 sebagaimana disampaikan saksi Safroni? Apakah saudara mengetahui, sedangkan saat itu saudara sebagai admin.
357	Saksi terlapor Irwan Arif Saputra)	Redaksi nya itu salah, karena laporan dari PPP itu tidak ada isinya, saya buat tidak patuh. Jadi setelah saya tanya kepada teman yang lain, itu tidak boleh dirubah.

358	Anggota Majelis Pemeriksa (Andi Setiawan)	Maksud dari tidak patuh menurut saudara bagaimana?
359	Saksi terlapor Irwan Arif Saputra)	Pada waktu BA itu timbul karena tidak ada isinya saya terbuat PPP tidak patuh. Setelah ditanya ke kabupaten lain, isinya tak boleh diubah sebagaimana aplikasi dari KAP.
360	Anggota Majelis Pemeriksa (Andi Setiawan)	KAP minta unlock untuk PPP, tanggal berapa KAP minta unlock itu?
361	Saksi terlapor Irwan Arif Saputra)	Tanggal 18 Maret 2024, atau setelah tanggal 29 Februari 2024.
	Anggota Majelis Pemeriksa (Mendra)	Jadi membuat redaksi patuh dan tidak patuh itu redaksi saudara sendiri?
362	Saksi terlapor Irwan Arif Saputra)	Iya, menurut itu seperti itu majelis.
363	Anggota Majelis Pemeriksa (Budi Kurnialis)	Dengan mensubmite LPPDK oleh partai politik, apakah itu bentuk cara menyampaikan dari parpol ke KPU? Apakah ada penyampaian bentuk fisik lainnya?
364	Saksi terlapor Irwan Arif Saputra)	Intinya dana kampanye disampaikan melalui system sikadeka. Bentuk lain tidak ada, namun jika mereka memberikan dokumen atau hard copy boleh saja ke KPU.
365	Anggota Majelis Pemeriksa (Budi Kurnialis)	Berdasarkan pedoman teknis apakah cukup saja mensubmite dengan beberapa item yang di isi oleh partai politik ? atauboleh saja hardcopy yang bisa diserahkan ke KPU?
366	Saksi terlapor Irwan Arif Saputra)	Iya betul majelis
367	Anggota Majelis Pemeriksa (Budi Kurnialis)	Kapam saudara mengetahui PPP pada tanggal 29 Februari 2024 pukul 22.49 wib, apakah pada hari yang sama? Terus kapan saudara download tanda terimanya dari sikadeka?
368	Saksi terlapor Irwan Arif Saputra)	Iya, tanggal 29 Februari 2024 semua parpol harus menyerahkan LPPDK. Karena hari itu hari terakhir menyampaikan LPPDK, Jadi harus menunggu pukul 23.59 wib. Sementara untuk mendownload hasil tanda terima dilakukan pada tanggal 1 atau tanggal 2 Maret 2024.
369	Anggota Majelis Pemeriksa (Budi Kurnialis)	Selanjutnya untuk tanda terima submite di tanggal 20 Maret 2024 oleh PPP, kapan saudara ketahui?
370	Saksi terlapor Irwan Arif Saputra)	Iya tanggal 20 Maret. Tanda terima ini kita download karena untuk tanda terima di tanggal 29 Februari 2024 sudah tertimpa dan tak bisa didownload lagi.
371	Ketua Majelis Pemeriksa (Usman)	Saya ingin mempertegas, menurut saudara apakah ketika parpol sudah mensubmite merupakan bagian jika parpol sudah menyampaikan laporan LPPDK?
372	Saksi terlapor Irwan Arif Saputra)	Iya, sudah menyampaikan.
373	Ketua Majelis Pemeriksa (Usman)	Misalkan dia sudah menyampaikan, tetapi tanpa ada lampirannya atau nominal yang dilampirkan apakah dikategorikan sudah cukup?
374	Saksi terlapor Irwan Arif Saputra)	Kalau kita lihat dari sistim sikadeka majelis, itu kita hanya menerima hasil dari partai saja majelis, bukan dari caleg.

375	Ketua Majelis Pemeriksa (Usman)	Pasal 53 ayat 3 PKPU 18, parpol peserta pemilu menyampaikan LPPDK sebagaimana ayat 1 dengan mengirimkan data dan dokumen yang diunggah di sikadeka, bagaimana maksudnya?
376	Saksi terlapor (Irwan Arif Saputra)	Setahu saya dokumen yang disampaikan dari calon tetap merupakan aktivitas pengeluaran yang disampaikan oleh mereka. Setelah dilaporkan calon akan disampaikan oleh parpol melalui akun parpol.
377	Ketua Majelis Pemeriksa (Usman)	Jika calegnya tidak memiliki akun, tidak menyampaikan kepada parpol, tapi kemudian parpol menyampaikan LPPDK melalui akun parpol untuk mensubmit, apakah tetap dianggap jika yang bersangkutan menyampaikan LPPDK?
378	Saksi terlapor (Irwan Arif Saputra)	Yang disubmite akun partai. Bukan akunnya caleg. Calon tetap dianggap menyampaikan laporan dana kampanye meskipun tidak memiliki akun calon, sementara hal itu disampaikan melalui parpol melalui akun sikadeka yang dikelola parpol.
379	Ketua Majelis Pemeriksa (Usman)	Mempertegas pernyataan saksi pelapor tadi, yakni mantan komisioner KPU yang lama menyatakan salah satu parpol tidak diterima LPPDK nya. Saksi tadi menyatakan ada kesalahan, kesalahan seperti apa yang dimaksud?
380	Saksi terlapor (Irwan Arif Saputra)	Izin majelis,waktu membuat berita acara, saat itu PPP tidak memiliki akun calon, sehingga saya bikin tidak patuh saat itu. Namun setelah ditanyakan ke kabupaten lain hal itu tidak perlu diubah.
381	Ketua Majelis Pemeriksa (Usman)	Apakah di revisi Berita Acaranya? Apak ada dibawa berita acaranya?
382	Saksi terlapor (Irwan Arif Saputra)	Tidak ada direvisi majelis. Berita acaranya tidak dibawa karena tidak dimasukkan kedalam alat bukti majelis.
383	Ketua Majelis Pemeriksa (Usman)	Baik, untuk kepentingan pembuktian kami minta BA taggal 29 Februari 2024 beserta lampirannya. Baik, silahkan Pelapor jika ada yang ingin ditanyakan lagi..
384	Pelapor (Sekretaris DPC Partai Gerindra Kab. Bengkalis, Iskandar)	Yang bisa membuka akun sikadeka parpol?
385	Saksi terlapor (Irwan Arif Saputra)	Parpol itu sendiri.
386	Terlapor KPU Bengkalis (Anggota KPU Suhardi)	Keberatan ketua majelis, hal ini pernah ditanyakan dan berulang-ulang.
387	Ketua Majelis Pemeriksa (Usman)	Baik, keberatan diterima
388	Pelapor (Sekretaris DPC	Izin majelis, saya hanya ingin mempertegas saja yang majelis, bukan mengulang-ulang pertanyaan.

	Partai Gerindra Kab. Bengkalis, Iskandar)	
389	Ketua Majelis Pemeriksa (Usman)	Baik, pelapor kalau mau mempertegas, dipertegas saja. Tapi jangan diulang-ulang lagi pertanyaan yang sama.
390	Pelapor (Sekretaris DPC Partai Gerindra Kab. Bengkalis, Iskandar)	Baik, sampai dimana batas kewenangan saudara membuka dan menutup aplikasi sikadeka PPP?
391	Saksi terlapor (Irwan Arif Saputra)	Sebagai admin tingkat kabupaten, ketika ada arahan dari provinsi untuk membuka unlock. Hanya saja unlock pencermatan atas permintaan KAP tanpa sepengetahuan parpol.
392	Pelapor (Sekretaris DPC Partai Gerindra Kab. Bengkalis, Iskandar)	Kami berpandangan apabila sudah melewati batas waktu itu, tidak bisa lagi ada kegiatan log dan unlock itu. Sudah jelas bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, akibat dari segala kegiatan itu merugikan semua pihak.
393	Ketua Majelis Pemeriksa (Usman)	Baik, kalau kita pertegas, karena majelis sudah menemukan kesimpulan dan nanti menjadi bahan pertimbangan majelis. Permintaan terakhir dari pelapor tadi, apakah saudara saksi bisa menampilkan kepada kami dalam sidang pemeriksaan ini aplikasi SIKADEKA dan bisa dibuktikan disini?
394	Saksi terlapor (Irwan Arif Saputra)	Bisa majelis, dengan menunjukan kepada peserta sidang aplikasi system sikadeka dan cara pengoperasiannya. Dengan mencotohkan untuk membuka LPPDK Parpol PPP.
395	Ketua Majelis Pemeriksa (Usman)	Baik, sidang pemeriksaan kita cukup untuk pemeriksaan saksi pada malam hari ini. Selanjutnya agenda kamis, pukul 11.00 wib dengan agenda pemeriksaan saksi dan pihak terkait. Dengan demikian, sidang untuk pembuktian kita tutup
396	Sekretaris Pemeriksa (M. Sarbini)	<ul style="list-style-type: none"> - Hadirin dimohon beridri - Hadirin dipersilahkan duduk kembali